

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

Humaira^{1*}, Lenso², Rosalia Putri³

¹ Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan,
Universitas Abulyatama, Aceh Besar

^{2,3} Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan,
Universitas Abulyatama, Aceh Besar

E-mail: ¹⁾ mairahumaira74@gmail.com

Abstract

Implementation is the act of implementing a scheme that has been carefully prepared to carry out development administration policies so that the process achieves the desired results. The purpose of this research is to describe how the Village Fund Allocation Policy is implemented in efforts to prevent stunting in Krueng Barona Jaya District, Aceh Besar District. One of the stunting management programs carried out by the village government is the provision of supplementary food (PMT). This program is provided through the village budget which prioritizes pregnant women, toddlers and the elderly. This type of research was carried out using qualitative research methods with a descriptive approach. This research obtained the result that the stunting management program originating from the village income and expenditure budget (APBDD) had been implemented in villages in Krueng Barona Jaya District. Conclusion The implementation of the Village Fund Allocation (ADD) Policy in Krueng Barona Jaya District in an effort to prevent stunting is running quite smoothly. This can be seen from the results of the preparatory stage of interviews in the form of preparing a List of Proposed Activity Plans (DURK), the completion of each activity up to the stage of preparing accountability.

Keywords: Implementation, Village Funds, Stunting, Public Policy

Abstrak

Implementasi adalah tindakan pelaksanaan sebuah skema yang telah disusun secara matang untuk melakukan kebijakan administrasi pengembangan sehingga proses mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Salah satu program penanganan stunting yang dilakukan pemerintah desa adalah pemberian makanan tambahan (PMT). Program ini diberikan melalui anggaran desa yang di prioritaskan untuk ibu hamil, balita dan lansia. Jenis penelitian yang di lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian ini di peroleh hasil bahwa program penanganan stunting yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDD) sudah terimplementasikan di desa-desa yang ada di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Kesimpulan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam upaya pencegahan stunting berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggung jawaban.

Kata kunci: Implementasi, Dana Desa, Stunting, Kebijakan Publik

1. PENDAHULUAN

Implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang (Sujianto, 2008). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut (Winarno, 2012). Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Saliman, 2011). Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas (Irawan & Simargolang, 2018).

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa (Lesmana et al., 2019). Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak yaitu masyarakat turut ikut mengambil bagian di dalam pengembangan desanya. Alokasi Dana Desa juga digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan daya masyarakat menuju suatu masyarakat yang sehat (Sanjiwani, 2015). Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kapasitas pendanaan sehingga pemberdayaan masyarakat itu dapat terpenuhi (Minang et al., 2021).

Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri tahun 2016, jumlah desa yang ada diseluruh Indonesia sebanyak 74.910 desa yang tersebar di 33 Provinsi. Salah satunya pada Provinsi Aceh dengan jumlah desa 6.497 desa yang tersebar 23 kabupaten/kota, di kabupaten Aceh Besar terdapat 604 desa dari 23 kecamatan (Yuliana dkk, 2019). Aceh Besar merupakan kabupaten yang mendapat jumlah alokasi dana desa yang terbesar di Aceh. Menurut pemerintah kabupaten Aceh Besar, jumlah dana desa untuk Kabupaten Aceh Besar sendiri yaitu sebesar Rp.350.971.062.000 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar Rp156.476.096.000. Untuk itu, besaran alokasi dana desa yang ada di Aceh Besar harus dapat diserap sesuai dengan anggaran yang telah disusun serta bermanfaat untuk masyarakat sekitar (Rahmadiansyah et al., 2018).

Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini terletak di dekat wilayah Ulee Kareng, Banda Aceh. Di Kecamatan Krueng Barona Jaya ini terdapat 12 desa/kelurahan yaitu: Desa Lamgapang, Desa Meunasah Baet, Desa Meunasah Intan, Desa Meunasah Manyang, Desa Rumpet, Desa Gla Meunasah Baro Desa Gla Dayah, Desa Lam Permai, Desa Miruk, Desa Lueng Ie, Desa Menasah Papeun, dan Desa Meunasah Bak Trieng. Dengan adanya kebijakan pengalokasian dana desa atau program yang dilaksanakan di desa-desa untuk pembangunan desa yang lebih baik, kapasitas pendanaannya bisa dikatakan tinggi sehingga pemberdayaan masyarakat itu terpenuhi untuk menuju masyarakat yang sehat. Dengan adanya kebijakan alokasi dana desa tersebut pemerintah desa atau aparaturnya yang menjalankan program-program pembangunan desa bisa dikatakan dengan satu bentuk implementasi kebijakan alokasi dana desa yang di salurkan dalam pencegahan stunting.

World Health Organization (WHO) pernah menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Hasil studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% tahun 2018 menjadi 27,67% tahun 2019 (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Meski menurun, angka ini dinilai masih tinggi, karena angka toleransi WHO untuk stunting sebesar 20 %. Pada tahun 2018 Kemenkes RI kembali melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) tentang Prevalensi Stunting. Berdasarkan Penelitian tersebut angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2 persen pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8 (Kemkes RI, 2018) dalam Rahmadhita (2020). Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data berbentuk hasil wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis serta catatan yang tidak terekam selama pengumpulan data (Sugiyono, 2015). Subjek penelitian untuk mengetahui Sejauh mana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting terlaksana, di kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dimana peneliti menentukan sendiri responden yang di inginkan berjumlah 18 orang.

Data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara peneliti dengan responden dengan teknik wawancara di mana hp (*handphone*) merupakan alat ukur dengan beberapa pertanyaan. Alat ukur ini digunakan pada responden. Dilakukan dengan memberikan mewawancarai pada aparatur yang ada di desa, bidan desa yang menjalankan program dan ibu yang memiliki anak stunting di kecamatan Krueng Barona Jaya kabupaten aceh besar. Untuk pengumpulan data sekunder, dalam penelitian ini yang dilakukan dengan pengambilan data dari Puskesmas Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara hasil Implementasi Kebijakan di desa Meunasah Intan:

a. R1 (Responden 1)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sejak kapan responden menjadi kepala desa. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Kalau di Meunasah Intan udah 2 priode berarti udah 9 tahun, karakteristik desa mempunyai 3 dusun. (R1)”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana karakteristik desa. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Karakteristik desa Meunasah Intan ini mempunyai 3 dusun dari ke tiga desa ini diberi nama desa 1 desa 2 dan desa 3. (R1)”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah di desa ini ada program untuk pencegahan stunting melalui sumber alokasi dana desa. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Ada, kalau pada tahun ini kami ada bukan hanya program untuk stunting tapi ada dana subsidi pendidikan bagi eeemmm siswa kurang mampu kami buatnya untuk siswa TK itu eeemmm yang utamanya dibidang pendidikan.” (R1)

Berdasarkan hasil wawancara sudah berapa lama program pencegahan stunting melalui sumber alokasi dana desa tersebut berjalan. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“kalau dibidang kesehatan berarti ini tahun ke 2 tentang stunting tahun yang lalu ada bekerja sama dengan Abulyatama juga dengan anggaran tahun ini anggarannya 18 juta tahun lalu 7 juta kami, dikasihnya per 3 bulan sekali karena kami kemaren melihat di tahun pertama yaitu tahun 2022 alhamdulillah sukses dengan dibantunya orang Abulyatama. Jadi ada peningkatan penurunan stunting dengan kami melakukan itu tahun kemaren.” (R1)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa rerponden yang telah diwawancara mengatakan:

“Biasanya kami buat musyawarah atau tulis semua pengeluwarannya atau uang masuk kami informasikan dan kami tulis di papan tulis bukan hanya untuk program kesehatan saja tapi untuk semua program yang ada di desa Menasah Intan ini naik itu anggaran subsidi pendidikan, pembangunan dan lainnya.” (R1)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana pemerintah desa dalam mengendalikan upaya pencegahan stunting melalui dana desa. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Pencairan dana desanya kan perdemik eeemm dalam setahun tu cairan dana desa nya 3 kali 40,40,40 kami perintahnya di 40% ke 2 jadi beri nilai setingnya kalau misal 18 juta ya kasih terus ke bidannya 18 juta jadi orang tu nanti eeemmm disesuaikan kembali dengan keadaan dilapangan.” (R1)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana pengalokasian dan dalam bentuk apa diberikan. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Ooo... dalam bentuk ini memang bentuk proteinnya dalam bentuk uang tapi untuk pemberiannya dalam bentuk makanan agar lebih mudah dalam penanggung jawaban. Karena kami menplotkan uang untuk anggaran itukan dibidang kesehatan 120 juta pertahun itu udah termasuk penanganan stunting, posyandu terintegrasi, pospindu itu ada balita, ptm.” (R1)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai siapa saja yang terlibat langsung dalam bentuk pelaksanaan atau pengawasan kegiatan pengalokasian dana desa untuk pencegahan stunting. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Kalau sekarang yang pertama kader karena kader yang dibawah naungan kpm, bidan bahkan keuchik pun ikut terlibat.” (R1)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengalokasian alokasi dana desa. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Sangat antusias, karena bisa dibilang anggaran dana desa ni eeeemmm kita bilang manfaatnya besar sekali ketimbang kita ikut program nasional yang tidak eeee apa yang tidak sanggup dinaugi oleh anggaran apbk tapi ada anggaran desa sangat bagus karena banyak kemasalahatan dikampung eeeeemmm tercegahi dengan dana desa untuk dibidang pendidikan, kesehatan, pembangunan bahkan pekerjaan-pekerjaan kecil itu bisa digunakan dengan dana desa itu manfaat paling besar sekarang.” (R1)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah kendala yang dialami atau ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan alokasi atau dana desa dalam upaya pencegahan stunting. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Kalau pelaksanaan kendala sekarang ya waktu pencairan dananya itukan mengikuti alur prosedur semua terkadang didesa sudah selesai perencanaannya dibulan 11 tapi pemerintah belum siap untuk pencairannya di awal tahun karena kemaren masuknya telat juga karena tahun kemaren beda dengan tahun 2021, 2021 diawal januari sudah klir masalah desa, ditahun ini akhir february kemaren normal karena desa sudah siap sekarang karena mengikuti alur prosedurnya dinovember kami sudah siap perencanaannya untuk tahun depan. Begitu juga dengan tahun ini, ini sudah bulan 8 agustus ini kami sudah melakukan musrembang untuk program-program apa yang dibentuk di input sesuai dengan visi misinya pak keuchik. Mungkin dipemerintahannya kami agak terkendala sedikit didesa semua sudah siap dipemerintah nya belum siap.” (R1)

Wawancara hasil dengan penanggung jawab di lapangan yaitu Bidan Desa Meunasah Intan.

b. R7 (Responden 7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sudah berapa lama responden menjalani profesi sebagai seorang bidan desa. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Saya menjadi bidan desa dari 1996 sampai dengan sekarang.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah tantangan terberat yang pernah dihadapi sebagai seorang bidan dilapangan. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Tantangan terberatnya ya itu kendala di lapangan tidak sesuai dengan teori yang di pelajari ahahaaa.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah ada program di puskesmas dan di desa untuk penanganan stunting. berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa reponden yang telah diwawancara mengatakan :

“Ada, Dari gizi ada program PMT (pemberian makanan tambahan) dari desa memang ada juga dari pak keuchiknya anggaranya dari dana desa untuk program penanggulangan stunting dengan pemberian pmt juga. RGG (rumah gizi gampong) juga ada. Kalau RGG dana nya dari dana desa juga.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber dana yang digunakan bersumber dari. berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa reponden yang telah diwawancara mengatakan:

“Dananya dari dana desa yang dikasih pak keuchik untuk dibelanjakan, sudah sesuai karena setiap pengangan ada laporan yang harus di setujuai oleh bapak keuchiknya.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dari pelayanan apakah bapak keuchik mendukung program tesebut. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Ya sangat mendukung, dukungannya pak keuchiknya ikut berpartisipasi langsung disetiap kegiatan yang di laksanakan di desa.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai berapa lama PMT-p diberikan. berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa reponden yang telah diwawancara mengatakan :

“Kemarentu adaa 6 bulan selama 6 bulan dalam satu minggu pemberian PMTnya 2 kali pemberian makanannya ada kerja sama juga kemaren dengan unsyiah orang tu sekalian penelitian juga.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai berdasarkan apa prioritas sasaran yang diberikan PMT-p. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Sasarannya ibu hamil, balita yang stunting dan lansia. Pmt yang diberikat sayur eeemm, protein telurkan, eeemm dah tu kalsiumnya susu kambing susu murni tu.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana mekanisme penyediaan bahan makanan untuk PMT-p. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Kami dari desa simpan bahannya di rumah pak keuchik masakanya disitu juga dibantu langsung oleh ibu-ibu kader dan ibu-ibu pkk.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana pendistribusiannya kesasaran. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Kami dari desa kasih makanann saat posyandu setelah balita di ukur ditimbang prosesnya baru setelahnya diberikan apresiasi beerupa makanan tambahan atau pmt.” (R7)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan penyimpanan. berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa reponden yang telah diwawancara mengatakan :

“Pengawasan yang dilakukan kami eeeemm dari pihak puskesmas dan pihak gizikan, ibu kepala puskesmas juga turun melakukan pengawasan apakah ada perkembangan kek tu. Ada kemaren tu malah ada dokter aslina dari spesialis anak dari unsyiah di undang cuman biayanya dari desa juga. Tanggapa Pokonya pak keuchik memang semangat dalam menurunkan angka stunting.” (R7)

Wawancara hasil dengan masyarakat desa Meunasah Baet.

c. R13 (Responden 13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan saat hamil. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Pernah, tapi tidak setiap bulan paling selang 1 bulan sekali pemeriksaatnya untuk USG biasanya saya melakukan pemeriksaan di rumah sakit kesdam.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah selama hamil ibu pernah mengalami masalah. berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Ada, paling masalahnya mual, muntah, pusing, lemas pas pertama-tama selebihnya gak ada sih.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah ibu pernah mendengar /memperoleh informasi tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan saat hamil. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Tau, paling yang di hindari cuman cuka aja sih, pedas juga gitu lain semua ssya makan hehehe.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah anak ibu menyusui atau minum susu formula. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Meraka berdua dapat keduanya asi dan susu formula juga, dikarenakan mereka kembar jadi tidak cukup berat badan, berat badan kurang jadi harus diberikan susu formula.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara usia berapa anak ibu diberikan MP-ASI. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Mereka pas usia 6 bulan baru dikasih nasi sebelum 6 bulan cuman diberikan susu sama asi aja.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah anak ibu mengalami masalah/kendala saat ibu memberikan makan. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Kendalanya ada karena memang gak mau dimakan makanannya padahal menunya sudah diganti-ganti tidak menu itu-itu saja tapi tetap gak mau makan.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah ibu sangat memperhatikan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan :

“Perhatikan, misalnya hari sayur ikan, kalau makanan warung memang gak mau kak kasih dulu walaupun orang lain kasih kak marah, paling biskuat itu ada kak kasih kalau jajan-jajan yang lain gak ada.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi dasar. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Ada dua kali kalau gak salah imunisasi, imunisasi pertama pas lahir sama polio tetes. (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apa ibu rutin membawa anak keposyandu. Berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa responden yang telah diwawancara mengatakan:

“Rutin, selama kak pergi ini rutin selalu.” (R13)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah ada pemberian makanan tambahan dari posyandu. berikut hasil wawancara peneliti dan beberapa reponden yang telah diwawancara mengatakan :

“Ada, bisanya dikasih bubur, buah-buahan seperti pisang, kurma, jeruk, apel. Selain disini ada dapat juga bantuan dari puskesmas dikarenakan mereka kurang berat badan dalam bentuk biasanya dikasih kacang hijau.” (R13)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti selesaikan dapat di simpulkan bahwa implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam upaya pencegahan stunting berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggung jawaban.

Ada beberapa kegiatan program yang dilakukan dalam pencegahan stunting di Desa-desa yang ada di Kecamatan Krueng Barona Jaya yaitu program pemberian makanan tambahan (PMT) melalui anggaran dana desa yang ditujukan kepada anak balita yang stunting yang dilakukan sektor kesehatan yaitu Puskesmas dan Posyandu yang ada di desa, untuk responden dengan memberikan Asi eksklusif selama 0-6 bulan dengan memberikan Asi eksklusif 2 tahun responden memberikan makanan pendamping asi setelah bayi berumur 6 bulan, responden memberikan imunisasi dasar lengkap untuk balita, responden yang melakukan pemeriksaan kehamilan semasa hamil, dan mendapatkan tablet tambah darah saat ibu hamil. Rata-rata responden menjawab “Tidak”.

Pelaksanaan sweeping bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi/balita agar tidak mengalami gizi buruk maupun stunting. Peran bidan desa dalam Kejadian stunting pada tingkat desa di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yaitu tim percepatan penurunan stunting melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit bidan desa , tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan di desa. Pemberian pola asuh dan pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) proses bayi menyusu segera setelah lahir yang belum maksimal dikarenakan asi ibu yang tidak keluar serta kurangnya sosialisasi dan dorongan terhadap pengetahuan ibu balita.

Adanya regulasi yang berganti menjadi penyebab terhambatnya realisasi kegiatan lain yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa karena harus diubah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Juga keterlambatan dana desa yang ditrasfer oleh pemerintah untuk desa padahal didesa sudah melakukan musrembang untuk program-program apa yang dibentuk di input sesuai dengan visi misinya pak keuchik di desa semua sudah siap di pemerintah nya belum siap.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, M. D., & Simargolang, S. A. (2018). Implementasi E-Arsip pada program studi teknik informatika. (*JurTI*) *Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), 67–84.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu Dan Budaya*, 42(1), 69–88.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 225–229.
- Rahmadiansyah, Agussabti, & Maulidini. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa(Add) Dan Pengaruh Terhadap Ekonomi Masyarakat Petani Di Kabupaten Aceh Besar. *Prosiding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI)*, 652–660.
- Saliman, A. R. (2011). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. In *Kencana*.
- Sanjiwani, N. A. D. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013)*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (1 (ed.)). Alfabeta,cv.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Alaf Riau.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center for Academic Publishing Service.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).